

Sunni dan Syiah dalam Perspektif Sejarah Awal Islam: Akar Teologis dan Dinamika Politik

Sunni and Shi'a in the Perspective of Early Islamic History: Theological Roots and Political Dynamics

Puspa Fitria Dewi¹, Nurlaelah Abbas², Mahmuddin³

Pascasarjana Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 December, 2025

Revised 30 December 2025

Accepted 10 January 2026

Available online 15 January 2025

Keywords

Sunni, Shi'a, Early Islamic history,
Leadership, Imamate, Political theology

Kata Kunci :

Sunni, Syiah, Sejarah awal Islam,
Kepemimpinan, Imamah, Teologi politik



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Abstract: This article examines the emergence of Sunni and Shi'a Islam within the context of early Islamic history by exploring their theological foundations and political dynamics. The division between the two traditions originated from debates over leadership succession following the death of the Prophet Muhammad, particularly concerning the legitimacy of authority and the nature of political and religious leadership. Sunni Islam conceptualized leadership as a matter of communal consensus grounded in pragmatic governance, whereas Shi'a Islam developed the doctrine of imamate by viewing leadership as a divinely ordained institution vested in the family of the Prophet. Through a historical and analytical approach supported by qualitative literature review, this study traces how initial political disputes gradually evolved into distinct theological systems that shaped divergent doctrines, patterns of religious authority, and collective identities. The findings demonstrate that the Sunni and Shi'a divide cannot be understood solely as a theological disagreement, but must be situated within broader historical processes involving power, legitimacy, and sociopolitical transformation. Understanding these historical roots is essential for fostering a more nuanced and constructive engagement with sectarian differences in contemporary Islamic discourse.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kemunculan Sunni dan Syiah dalam perspektif sejarah awal Islam dengan menelusuri akar teologis serta dinamika politik yang melatarbelakanginya. Perpecahan antara kedua tradisi ini berawal dari perdebatan mengenai suksesi kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, khususnya terkait legitimasi kekuasaan dan konsep kepemimpinan politik dan keagamaan. Sunni memandang kepemimpinan sebagai hasil musyawarah umat yang bersifat ijtihadi dan pragmatis, sedangkan Syiah mengembangkan doktrin imamah yang menempatkan kepemimpinan sebagai institusi ilahiah yang diwariskan kepada keluarga Nabi. Melalui pendekatan historis dan analitis dengan dukungan kajian literatur kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik pada masa awal Islam secara bertahap berkembang menjadi perbedaan teologis yang sistematis, membentuk doktrin, pola otoritas keagamaan, dan identitas kolektif masing-masing kelompok. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teologi, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara sejarah, politik, dan agama. Pemahaman terhadap akar sejarah ini penting untuk membangun wacana keislaman yang lebih inklusif dan dialogis di masa kini.

PENDAHULUAN

Persoalan kepemimpinan pascawafat Nabi Muhammad merupakan salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Ketidadaan ketentuan eksplisit mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan membuka ruang bagi beragam interpretasi di kalangan umat Islam. Perbedaan penafsiran tersebut kemudian berkembang menjadi dua arus besar pemikiran yang dikenal sebagai Sunni dan Syiah. (Wardana et al. 2025) Pada tahap awal, perbedaan ini bersifat politis, namun dalam perkembangannya mengalami transformasi menjadi perbedaan teologis dan ideologis yang berpengaruh luas terhadap konstruksi pemikiran dan identitas keislaman. (Azra 2016)

*Corresponding Author

Email: puspafitriadewi@gmail.com, nurlaelah.abbas@uin-alauddin.ac.id, mahmuddin.harun@uin-alauddin.ac.id

Dalam konteks sejarah awal Islam, kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan komunitas mendorong lahirnya model kepemimpinan berbasis musyawarah. Pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin pertama umat Islam melalui kesepakatan para sahabat menjadi dasar bagi terbentuknya paradigma kepemimpinan Sunni. Dalam pandangan ini, kepemimpinan dipahami sebagai institusi sosial-politik yang bersifat ijtihadi dan fungsional, dengan tujuan utama menjaga persatuan umat dan menegakkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak ditempatkan sebagai bagian esensial dari akidah, melainkan sebagai sarana praktis dalam pengelolaan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Berbeda dengan itu, Syiah mengembangkan pandangan kepemimpinan yang berakar pada keyakinan bahwa otoritas umat Islam seharusnya berada pada keluarga Nabi. (Al Musawa et al. 2024) Pandangan ini melahirkan doktrin imamah yang menempatkan kepemimpinan sebagai institusi ilahiah yang memiliki dimensi teologis sekaligus spiritual. Dalam kerangka ini, imam tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan yang memiliki legitimasi religius khusus. Seiring berjalannya waktu, konsep imamah menjadi fondasi utama dalam pembentukan teologi, hukum, dan struktur otoritas Syiah. (Hafi, Santi, and Yamani 2025)

Perbedaan antara Sunni dan Syiah menunjukkan bahwa konflik kepemimpinan pada masa awal Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan doktrin keagamaan. Konflik tersebut berlangsung dalam konteks sosial dan politik yang kompleks, melibatkan perebutan legitimasi, kekuasaan, dan otoritas simbolik. Proses historis inilah yang kemudian mendorong terjadinya teologisasi konflik politik, sehingga perbedaan awal yang bersifat praktis berkembang menjadi sistem pemikiran keagamaan yang mapan dan bertahan hingga kini.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada pendekatan historis-analitis yang menempatkan perbedaan Sunni dan Syiah sebagai hasil interaksi dinamis antara teologi dan politik, bukan sebagai perbedaan teologis yang bersifat ahistoris. Berbeda dari kajian normatif yang cenderung memposisikan kedua kelompok dalam kerangka kebenaran-doktrinal, artikel ini menelusuri bagaimana realitas politik awal Islam berperan dalam membentuk konstruksi teologi kepemimpinan masing-masing tradisi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan integratif dalam memahami akar perbedaan Sunni dan Syiah.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kemunculan dan perkembangan pandangan kepemimpinan Sunni dan Syiah dalam sejarah awal Islam dengan menekankan keterkaitan antara faktor teologis dan dinamika politik. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian Islam serta membuka ruang dialog akademik yang lebih objektif dan konstruktif dalam memahami keragaman pemikiran keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Fokus penelitian diarahkan pada analisis historis dan konseptual terhadap perbedaan pandangan Sunni dan Syiah dalam konteks sejarah awal Islam, khususnya terkait persoalan kepemimpinan umat dan pembentukan otoritas keagamaan-politik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana dinamika politik awal Islam berkontribusi terhadap lahirnya konstruksi teologis yang berbeda dalam kedua tradisi tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik dan literatur utama yang membahas peristiwa suksesi kepemimpinan pascawafat Nabi Muhammad serta perkembangan awal pemikiran Sunni dan Syiah. Data sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kepemimpinan Islam, teologi politik, dan sejarah pemikiran Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan Sunni dan Syiah mengenai kepemimpinan, kemudian membandingkan perbedaan dan persamaannya berdasarkan konteks historis dan kerangka teologis yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan dalam Konteks Sejarah Awal Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan merupakan isu sentral yang muncul segera setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Kondisi ini menuntut penyelesaian cepat demi menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan komunitas Muslim yang masih berada pada fase awal pembentukan. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi religius dan otoritas moral.

Secara historis, peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah menjadi tonggak awal terbentuknya model kepemimpinan berbasis musyawarah.(Setiani 2019) Pemilihan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam menunjukkan bahwa pertimbangan pragmatis dan kebutuhan politik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan dipahami sebagai sarana untuk menjaga persatuan umat, bukan sebagai posisi yang ditentukan melalui garis keturunan atau mandat ilahi yang eksplisit. Temuan ini memperlihatkan bahwa sejak awal, dimensi politik dan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan struktur kepemimpinan Islam.

Dalam perkembangannya, peristiwa-peristiwa politik tersebut menjadi rujukan utama dalam perumusan teori kepemimpinan Islam. Sejarah awal Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang membentuk cara pandang umat terhadap otoritas. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam harus dipahami sebagai produk interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan realitas sosial-politik yang melingkupinya.

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Sunni

Berdasarkan analisis literatur, kepemimpinan dalam perspektif Sunni dikonstruksikan sebagai institusi sosial-politik yang bersifat ijtihadi. Kepemimpinan tidak ditempatkan sebagai bagian dari rukun iman, melainkan sebagai mekanisme praktis untuk mengelola urusan umat. Prinsip musyawarah dan konsensus menjadi dasar utama dalam menentukan legitimasi seorang pemimpin. Dengan demikian, otoritas politik tidak bersifat absolut, tetapi bergantung pada penerimaan dan kesepakatan komunitas.

Pandangan Sunni menekankan bahwa pemimpin ideal adalah sosok yang mampu menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan umat.(Fikhriyah 2025) Aspek moral dan kompetensi administratif lebih diutamakan dibandingkan klaim keturunan atau keistimewaan spiritual tertentu. Dalam kerangka ini, kepemimpinan dipahami secara fungsional, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan kolektif umat Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa fleksibilitas menjadi karakter utama dalam teori kepemimpinan Sunni. Perubahan konteks sosial dan politik memungkinkan terjadinya variasi dalam praktik kepemimpinan tanpa harus mengubah fondasi teologis. Hal ini menjelaskan mengapa dalam sejarah Islam Sunni, bentuk pemerintahan dapat berkembang dari khilafah awal hingga monarki, tanpa dianggap bertentangan secara prinsipil dengan ajaran agama.

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Syiah

Berbeda dengan Sunni, kepemimpinan dalam perspektif Syiah memiliki dimensi teologis yang sangat kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin imamah menjadi landasan utama dalam memahami otoritas kepemimpinan. Imamah dipandang sebagai institusi ilahiah yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan diwariskan kepada keluarga Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mengandung otoritas spiritual dan keagamaan.

Dalam pandangan Syiah, imam memiliki kedudukan istimewa sebagai penafsir ajaran agama yang sah. Otoritas imam tidak bergantung pada konsensus umat, melainkan pada legitimasi ilahi. Konsep ini menempatkan kepemimpinan sebagai bagian integral dari akidah, sehingga penolakan terhadap imam yang sah dapat dipahami sebagai penyimpangan teologis. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah bukan sekadar variasi politik, melainkan perbedaan mendasar dalam cara memahami hubungan antara agama dan kekuasaan.

Selain itu, konsep imamah berkembang sebagai respons terhadap pengalaman historis marginalisasi politik yang dialami kelompok pendukung keluarga Nabi. Dengan demikian, doktrin teologis Syiah tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi merupakan hasil dialektika antara keyakinan religius dan realitas politik yang tidak berpihak. Hal ini memperkuat argumen bahwa sejarah memainkan peran penting dalam pembentukan teologi.

Akar Teologis Perbedaan Sunni dan Syiah

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan teologis antara Sunni dan Syiah berakar pada cara masing-masing tradisi memaknai sumber otoritas dalam Islam. Sunni menempatkan Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus umat sebagai fondasi utama, sementara Syiah menambahkan otoritas imam sebagai sumber legitimasi religius. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada struktur pemikiran teologis dan hukum Islam dalam kedua tradisi.

Dalam perspektif Sunni, kebenaran teologis bersifat kolektif dan terbuka terhadap ijtihad. Hal ini memungkinkan munculnya keragaman pendapat dalam batas-batas tertentu. Sebaliknya, dalam tradisi Syiah, otoritas keagamaan lebih terpusat pada figur imam, sehingga interpretasi ajaran agama memiliki rujukan yang lebih spesifik. Perbedaan pendekatan ini membentuk karakter teologi yang berbeda, baik dalam aspek doktrinal maupun praksis keagamaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan teologis tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan komunitas masing-masing. Teologi berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan identitas, legitimasi, dan keberlanjutan komunitas dalam konteks sosial-politik tertentu.

Dinamika Politik dan Teologisasi Konflik Kepemimpinan

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya proses teologisasi terhadap konflik politik yang terjadi pada masa awal Islam. Persoalan kepemimpinan yang semula bersifat praktis dan politis secara bertahap diberi makna teologis. Proses ini menyebabkan perbedaan politik berkembang menjadi perbedaan keyakinan yang mengakar dan sulit dipisahkan dari identitas keagamaan.

Dalam konteks Sunni, stabilitas politik mendorong penerimaan terhadap kepemimpinan yang efektif meskipun tidak ideal secara moral. Sementara itu, dalam konteks Syiah, pengalaman ketidakadilan politik memperkuat keyakinan akan pentingnya kepemimpinan yang sah secara teologis. Dinamika ini menunjukkan bahwa politik dan teologi saling memengaruhi dalam pembentukan tradisi keislaman.

Pembahasan ini menegaskan bahwa konflik Sunni-Syiah tidak dapat direduksi menjadi persoalan perbedaan doktrin semata. Konflik tersebut merupakan hasil dari proses historis yang kompleks, melibatkan negosiasi antara kekuasaan, legitimasi, dan keyakinan religius.

Implikasi Historis dan Relevansi Kontemporer

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman relasi Sunni dan Syiah pada masa kini. Dengan menempatkan perbedaan tersebut dalam kerangka sejarah awal Islam, konflik sektarian dapat dipahami secara lebih proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini membuka ruang bagi dialog akademik yang lebih objektif dan menghindarkan penilaian normatif yang cenderung polemik.

Selain itu, pemahaman terhadap akar historis dan teologis perbedaan Sunni dan Syiah dapat berkontribusi pada pengembangan wacana keislaman yang lebih inklusif. Dengan menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil dinamika sejarah, umat Islam dapat membangun sikap saling memahami dan menghargai keragaman pemikiran dalam tradisi Islam.

SIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah berakar pada persoalan kepemimpinan umat Islam pascawafat Nabi Muhammad yang berlangsung dalam konteks sejarah awal Islam. Perbedaan tersebut pada mulanya bersifat politis dan berkaitan dengan upaya menentukan legitimasi otoritas kepemimpinan, namun dalam perkembangan selanjutnya mengalami proses institusionalisasi dan teologisasi hingga membentuk dua tradisi keislaman yang memiliki karakter doktrinal yang berbeda.

Dalam perspektif Sunni, kepemimpinan dipahami sebagai institusi sosial-politik yang bersifat ijtihadi dan fungsional, dengan legitimasi yang bertumpu pada musyawarah dan konsensus umat. Kepemimpinan tidak diposisikan sebagai bagian dari prinsip keimanan, melainkan sebagai mekanisme praktis untuk menjaga stabilitas dan keteraturan kehidupan sosial umat Islam. Sebaliknya, Syiah mengembangkan konsep imamah yang menempatkan kepemimpinan sebagai institusi ilahiah dengan dimensi teologis dan spiritual, di mana otoritas kepemimpinan dilekatkan pada keluarga Nabi sebagai pemegang legitimasi religius yang sah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai perbedaan teologis semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara dinamika politik, konstruksi teologis, dan proses sejarah yang panjang. Dengan pendekatan historis-analitis, artikel ini memberikan kontribusi pada kajian keislaman dengan menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dan integratif terhadap akar perbedaan kedua tradisi tersebut. Pemahaman semacam ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta mendorong sikap yang lebih objektif, dialogis, dan inklusif dalam memahami keragaman pemikiran Islam.

REFERENSI

- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.
- Fikhriyah, R. (2025). Perspektif Al-Mawardi konsep negara dan kepemimpinan dalam Islam periode klasik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Imāmah dalam Islam: Kajian historis dan relevansinya terhadap kepemimpinan kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 72–87.
- Al Musawa, N., Rasyid, D., Hidayat, K., Farhana, N., Rahman, D., Arafah, M., & Santoso, B. (2024). Peran Persia sebagai pusat global, geopolitik dan dakwah serta pemikiran dan praktik aliran Syi'ah. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 16(2), 435–444.
- Setiani, R. (2019). Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam buku *Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani Umayyah* dan relevansinya dengan kepemimpinan kepala sekolah.
- Wardana, Z. K., Sujana, A. M., Rahmah, R. D., Setiawati, N. L., Nisa, H., & Ramadanti, K. O. (2025). Studi historis tentang krisis kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4575–4581.